

REVITALISASI KETENAGAKERJAAN DAN KESEMPATAN KERJA TERKAIT STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEDESAAN ¹

ROOSGANDHA ELIZABETH

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Jl. A. Yani No. 70. Bogor 16161

Email: caser@indosat.net.id

ABSTRACT

The fact that a close relationship exist between farmlands and agricultural activities brought about consequence that effort for improving farmers welfare cannot be based only on technological and institutional improvement. The problem to be faced at present a however, that farmlands tend to be increasingly limited, due to competition with other uses of lands, where as people working in the sector of agriculture is steadily, and absolutely increasing, resulting in an increasingly limited average proprietorship and control of land. These reviews discuss the structure of job opportunities and income, and their interrelations, as well as the causal relation between income expenditure levels of the society, in agricultural and non-agricultural sector. Productivity of labor as a production factor is considered for more important in farm role obtaining the income, than labor absorption itself. Agro-ecosystem an ecological disparities should be identified from variables of job opportunities, income, and society expenditure. Economic development induces changes of sectoral economic structure, such from agricultural sector to industrial sector, but isn't accompanied by labor structural shift. There should be employment also for other sectors, not only for agricultural sectors.

Keywords: Competition, Labor, Farmlands, Farmer's Income, Job Opportunities.

ABSTRAK

Problema penciptaan lapangan pekerjaan di pedesaan selalu menjadi tantangan berat bagi strategi dan kebijakan pembangunan pertanian dilandasi kekurangmampuannya menyerap limpahan tenaga kerja. Tingginya tingkat konversi lahan menyebabkan makin terbatasnya lahan pertanian untuk kawasan industri, prasarana ekonomi, dan pemukiman sebagai dampak pertumbuhan ekonomi global, namun tidak disertai peningkatan produktivitas ketenagakerjaan dan kesempatan kerja. Globalisasi ekonomi menyebabkan perubahan pola penguasaan lahan dan hubungan kerja, pola konsumsi dan pendapatan masyarakat pedesaan, kompetisi dan produktivitas tenaga kerja dan kesempatan kerja. Diperlukan revitalisasi strategi dan kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan yang mampu mengontrol konversi lahan produktif, mempertimbangkan peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, dan struktur ketenagakerjaan antar sektoral terutama industri.

Kata kunci: Kompetisi, Tenaga Kerja, Lahan Usahatani, Pendapatan Petani, Kesempatan Kerja.

¹ Merupakan hasil review yang diimplementasikan dari berbagai hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh institusi PSE, Bogor.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian yang pesat di Indonesia akibat pelaksanaan strategi dan kebijakan pembangunan, telah menyebabkan perubahan struktur ekonomi sektoral, meski demikian, belum sepenuhnya mampu diimbangi pergeseran struktur tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa laju pergeseran tenaga kerja relatif lebih lambat dibanding laju pergeseran ekonomi sektoral; dimana titik balik untuk aktivitas ekonomi di Indonesia lebih dulu tercapai dibanding titik balik penggunaan tenaga kerja (labour turning point). (Manning, 1995). Problema penciptaan lapangan pekerjaan di pedesaan tampaknya akan selalu menjadi tantangan berat bagi pemerintah dilandasi oleh kurang mampunya sektor non-pertanian dalam menyerap tenaga kerja yang semakin melimpah. Kondisi tersebut juga sebagai konsekuensi makin terbatasnya lahan pertanian akibat tingginya tingkat konversi (alih fungsi) lahan ke penggunaan non-pertanian (untuk kawasan industri, prasarana ekonomi, dan pemukiman) yang terus berlangsung. Sumaryanto, dkk. (1994), mengestimasi rata-rata 23.100 hektar per tahun lahan di Jawa terkonversi ke penggunaan di luar pertanian. Berbagai proses pelaksanaan pembangunan, terutama industrialisasi, dalam jangka menengah dan panjang, mempengaruhi pola penguasaan lahan, pola hubungan kerja dan struktur kesempatan kerja, serta pendapatan petani di pedesaan.

Masyarakat pertanian di pedesaan pada umumnya masih tergolong miskin dan mayoritasnya mengandalkan tenaga kerja sebagai sumberdaya utama proses produksi. Aspek ketenagakerjaan diharapkan dapat memberi peluang bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya (bukan sekedar subsisten belaka), terutama para buruh tani. Tekanan ekonomi kapitalis ke pedesaan berupa penerapan teknologi modern dan sistem pasar (mengutamakan efisien) serta perubahan nilai ekonomi mengakibatkan tingginya tingkat konversi tanah dari pertanian ke non-pertanian. Akibatnya, adalah hilangnya kesempatan kerja bagi sebagian besar buruh tani, serta semakin longgarnya ikatan-ikatan sosial yang terjalin dalam masyarakat pedesaan.

Pembangunan pertanian yang menganut paradigma modernisasi dengan mengutamakan prinsip efisiensi telah menyebabkan terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat. Perubahan yang terjadi terutama terkait dengan struktur kepemilikan lahan pertanian yang mengakibatkan terjadinya: 1)petani lapisan atas, yang akses pada sumberdaya lahan, kapital, mampu merespon teknologi dan pasar dengan baik serta mempunyai peluang berproduksi yang berorientasi keuntungan; 2)petani lapisan bawah yang relatif miskin (dari segi lahan dan kapital), tetapi hanya memiliki faktor produksi tenagakerja. Untuk memenuhi kebutuhan berproduksi, kedua lapisan masyarakat tersebut terlibat dalam ketimpangan suatu hubungan kerja (pada dasarnya kurang seimbang). Hal ini

terjadi dipacu oleh pertumbuhan populasi (angkatan kerja, migrasi) dan perkembangan teknologi yang akhirnya menempatkan para pekerja (kaum petani) pada posisi yang lemah.

Makalah ini merupakan review dari berbagai penelitian, yang bertujuan untuk: mengetahui dinamika struktur tenaga kerja dan kesempatan (peluang) ketenagakerjaan di pedesaan; dinamika perubahan pola hubungan kerja di pertanian dengan mengidentifikasi dan menggali informasi tentang dinamika dan perubahan ketenagakerjaan pertanian di pedesaan; faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika dan perubahan tersebut dalam sistem pembangunan pertanian yang ada sebagai dampak pelaksanaan pembangunan terhadap struktur kesempatan kerja dan struktur pendapatan di pedesaan; mengkaji hubungan antara faktor sosial, ekonomi dan budaya terhadap struktur kesempatan ketenagakerjaan dan hubungannya dengan struktur pendapatan masyarakat petani di pedesaan.

Metodologi Penulisan dan Kerangka Pemikiran

Makalah ini merupakan kajian sosiologis dan review berbagai literatur yang dianggap berhubungan dengan pola hubungan kerja, konversi lahan, struktur kesempatan kerja dan struktur pendapatan masyarakat pertanian di pedesaan. Titik berat penulisan ini pada pendekatan kualitatif dengan memberi penekanan pada proses-proses dan makna yang tidak diuji secara ketat dari segi kuantitas. Tujuan penulisan dijawab dengan mereview berbagai kombinasi strategi studi kasus dan studi historis yang diimplementasikan dengan berbagai pendekatan literatur terkait dan dikemukakan secara deskriptif.

Dari sisi sumberdaya manusia, aspek ketenagakerjaan di tingkat petani merupakan topik kajian yang perlu mendapat perhatian. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian relatif terhadap produktivitas di sektor industri dan jasa, merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian di masa datang. Rendahnya produktivitas tenaga kerja sektor pertanian antara lain karena terjadinya pergeseran kontribusi terhadap PDB dari sektor pertanian belum disertai dengan perpindahan secara proporsional angkatan kerja ke sektor non-pertanian (industri dan jasa). Aspek tingginya ahli fungsi (konversi) lahan dari pertanian menjadi non-pertanian juga sangat mempengaruhi, dimana para petani dengan alasan ekonomi seakan berlomba menjual lahan usahatani; yang akhirnya, membuat mereka menjadi *land-less* karena tidak mempunyai lahan pertanian lagi untuk diusahai, ataupun sudah terlalu sempit untuk mampu menghasilkan produksi yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.

Aspek ketenagakerjaan di wilayah pedesaan umumnya dilakukan dengan hubungan yang bersifat bebas, antara lain sistem hubungan kerja dengan upah harian lepas, dengan upah borongan, sistem bawonan/persen-an, patron klien dan tebasan. Peran pemerintah desa relatif kecil (bahkan tidak ada) dalam menentukan tingkat upah. Bagi rumahtangga buruh tani, sumber pendapatan dari kegiatan berburuh, khususnya berburuh tani, memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian rumahtangga. Para buruh tani

sebagai pihak penyedia tenaga kerja, dengan adanya hubungan kerja yang disepakati merupakan jaminan tersedianya kesempatan kerja, dalam arti mendapat kemudahan dalam mencari pekerjaan. Para buruh tani, terutama di wilayah yang kelebihan tenaga kerja, seperti adanya buruh migran dari luar wilayah, hubungan baik yang dibina dengan majikan/pemilik lahan merupakan jaminan memperoleh pekerjaan sebagai sumber pendapatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak pertengahan dasawarsa 1980-an, di pedesaan terjadi perubahan pesat yang tidak homogen kecepatan dan besarnya, dimana aktivitas non pertanian semakin nyata berperan dalam penciptaan kesempatan kerja dan pendapatan, walau di desa lain masih berlangsung lambat sehingga dominasi sektor pertanian masih sangat nyata (terjadi baik di Jawa dan luar Jawa). Seiring dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, maka aksesibilitas pedesaan terhadap wilayah urban semakin meningkat, dimana kaitan antar sektor perekonomian semakin erat dan kapasitas ekonomi wilayah juga semakin berkembang. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan akan barang dan jasa-jasa, pertumbuhan angkatan kerja membutuhkan kesempatan kerja yang semakin banyak, namun sumberdaya semakin langka adanya. Interaksi antar faktor-faktor berimplikasi luas terhadap struktur kesempatan kerja dan pendapatan di pedesaan.

Pemahaman mengenai dinamika kesempatan kerja dan pendapatan di pedesaan dilakukan melalui penelitian terintegrasi mengenai aspek penguasaan tanah dan hubungan kerja. Tanah berperan sebagai faktor produksi pertanian yang sangat vital (*'land based agriculture'*), juga merupakan aspek produksi yang menderivasi kesempatan dan peluang perolehan pendapatan. Kebutuhan tenaga kerja sangat tergantung pada struktur kepemilikan lahan, termasuk luas lahan garapan, teknologi pertanian yang diterapkan, tenaga kerja yang tersedia, serta sistem sosial yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Yang terakhir ini meliputi nilai-nilai sosial atau norma yang berlaku dalam tatanan kerja antar dua pihak yang berkepentingan.

Beberapa tahun terakhir ini, mendapatkan tenaga kerja dengan sistem upah harian cenderung tetap mudah. Hal ini bertentangan dengan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa banyak tenaga kerja pertanian yang pindah ke pekerjaan lain di luar pertanian. Secara statistik, jumlah responden yang memburuh (buruh tani), umumnya bekerja pada lahan sawah, tegal dan kebun, dimana kebanyakan adalah pria dengan jumlah terbesar terdapat pada lahan tegal. Dinamika dan perubahan ketenagakerjaan yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu mempengaruhi aktivitas para buruh tani dalam konteks bila terjadi alih fungsi (konversi) lahan dari pertanian menjadi non-pertanian (tempat pemukiman atau tempat perdagangan/ ekonomi, yang memang tinggi intensitasnya di daerah ini). Sebagian besar hubungan bersifat stabil dalam arti majikan cenderung selalu menggunakan buruh

yang sama pada kegiatan usahatani di musim yang berbeda, karena terjadi kecocokan dan adanya kesepakatan diantara pemilik tanah/majikan dan buruh pekerja usahatannya.

Di Aceh, untuk sektor pertanian, di samping menekuni kegiatan usahatani tanaman pangan, perkebunan, peternak, nelayan, keluarga petani menambah pendapatan dengan mencari kerja sampingan sebagai buruh tani/nelayan atau buruh non pertanian. Hasil penelitian Muchjidin, dkk (1995)², menunjukkan rata-ran sumber pendapatan sebagai petani dan nelayan 51,65%; buruh tani 9,69% dan 38,66% non pertanian; dimana penyumbang terbesar adalah dari sektor perdagangan, tenaga tatalaksana (pegawai) dan tenaga bangunan. Pada desa dengan agrosistem lahan sawah, proporsi pendapatan paling dominan adalah petani, sedang desa dengan agrosistem tambak dan perikanan tangkap proporsi pendapatan dari buruhtani relatif lebih menonjol. Oleh karena itu, *kesempatan kerja sangat ditentukan oleh agrosistem masing-masing desa*.

Cukup besarnya proporsi buruhtani juga diakibatkan oleh *tidak meratanya kepadatan penduduk antar daerah yang dipengaruhi oleh tingkat kesuburan dan kelancaran sarana hubungan, sehingga terjadi ketimpangan penguasaan lahan* pertanian, dengan kepemilikan lahan rata-rata hanya 41,39% dengan konsentrasi luasan lahan kurang dari 0,5 ha. Tenaga kerja wanita umumnya digunakan untuk kegiatan tanam dan pemeliharaan (34% dari total penggunaan tenaga pria), sedang untuk panen dan pasca panen penggunaan tenagakerja pria dan wanita relatif seimbang. Sementara di beberapa daerah kegiatan pertanian diambil alih wanita karena pria menjadi tenaga buruh bangunan.

Pada agroekosistem lahan kering (Sidodadi dan G. Pungki), banyak mengusahakan tanaman perkebunan dan merupakan sentra produksi karet dan kelapa sawit, dengan curahan tenaga kerja yang berbeda tergantung pada luasan lahan perkebunan yang diusahai dan kegiatan produksi perkebunan (bila sedang berproduksi, maka membutuhkan tenagakerja yang lebih banyak). Untuk usahatani dan buruh non-pertaniannya, 23,09% memiliki lahan usaha sedang 76,91% merupakan *landless*, sehingga terpaksa bekerja di sektor non pertanian, yang bervariasi, tergantung pada aksesibilitas daerah, kesempatan kerja yang tersedia dan karakter penduduk setiap desa. Untuk menambah penghasilan rata-rata 36% rumah tangga bekerja sebagai buruhtani dan lebih dari 82% rumah tangga bekerja sebagai buruh tani. Untuk daerah agroekosistem sawah dan lahan kering, sumber pendapatan dominan berasal dari usaha non pertanian (63%), sedang pada agroekosistem perikanan pantai 92% pendapatan berasal dari non pertanian (tabel 1).

² Struktur Kesempatan Kerja di Pedesaan Prop. D.I. Aceh. LHP, 1996, Studi PATANAS.

Tabel 1. Proporsi (%) RT yang Bekerja di Non Pertanian, Desa Patanas Prop. D.I Aceh, 1995

Jenis Pekerjaan	Ateuk	Simpang Tiga	Meunasah Tambo	Sidodadi	Gunung Pungki	Meunasah Tengah
1.Pamong/PNS	29,4	2,6	30,4	4,0	8,2	16,0
2.Us. Industri	6,0	26,3	0	14,0	10,2	4,0
3.Mencari benda di alam bebas.	3,9	15,8	6,5	2,0	67,3	0
4.Jasa angkutan	3,7	2,6	10,9	8,0	4,1	8,0
5.Tk.Bangunan	62,7	10,5	0	24,0	10,2	4,0
6.Perdagangan	0	10,5	0	0	0	0
7.Buruh industri	0	23,7	0	0	59,2	4,0

Catatan: Nilai di atas adalah persentasi rt yang memiliki usaha di luar pertanian (data survei Patanas, 1995).

Gini Indeks (GI) sebaran pemilikan lahan di agrosistem sawah (Meunasah Tambo dan Tengah) cukup tinggi (0,76) mengindikasikan tingginya tingkat ketimpangan penguasaan lahan ini juga ditunjukkan oleh daerah agrosistem lahan kering (G. Pungki) dengan GI sebesar 0,657, mengakibatkan semakin tingginya Rt yang menambah penghasilan dari buruh tani. Di daerah sentra perkebunan (kopi) dan hortikultura, GI = 0,34 mengindikasikan meratanya sebaran pemilikan lahan kebun di agrosistem lahan kering dataran tinggi (Sidodadi).

Pada penelitian struktur kesempatan kerja di Kalimantan Selatan (1996)³, ditemukan bahwa terdapat jenis pekerjaan yang beragam, yang sebelumnya tidak teridentifikasi seperti menjadi *calo* penumpang angkot sebagai alternatif pencarian kesempatan kerja di luar pertanian yang disebabkan adanya kejenuhan dan tingkat pertambahan penduduk yang melebihi kapasitas kesempatan kerja di sektor pertanian; di samping pekerjaan konvensional seperti petani, nelayan, peternak dan buruhtani sebagai jenis pekerjaan yang paling memberi kesempatan pekerjaan bagi penduduk di desa contoh yang merupakan desa bekas transmigrasi seperti desa Budi Mulia, Ujung Batu dan Surian Hanyar.

Tingginya tingkat keragaman pekerjaan (sekitar 34 jenis pekerjaan yang teridentifikasi) agaknya dipengaruhi oleh jauh dekatnya dengan pusat kegiatan ekonomi dan juga dikarenakan terjadinya adalah akibat kemiskinan penduduk dan daerah yang bersangkutan. Adat istiadat dan kebiasaan di suatu daerah sangat mempengaruhi tingkah laku dalam menggarap lahan pertanian, dimana di desa transmigran asal Jawa cenderung menggunakan sistem upah harian (Budi Mulia dan Ujung Batu), sedang desa asli cenderung menggunakan sistem borongan kecuali desa Bakarangan dan Babirik Hilir. Kesempatan berburuh dan intensitas kerja di desa Budi Mulia dan Ujung Batu relatif besar karena adanya kegiatan usaha besar perkebunan (PTP) tebu dan HTI dan juga merupakan kewajiban petani transmigran tebu, di samping mengusahakan lahan sendiri.

Perbedaan penghasilan usahatani di samping karena luasan lahan usaha juga dipengaruhi tingkat kesuburan, teknologi dan saprodi yang dipakai, serta akses yang baik terhadap pusat industri dan perdagangan sehingga memungkinkan masyarakatnya bekerja di bidang ini sebagai buruh dan pedagang. Sementara itu, pola hubungan kerja dominan di 8

³ Struktur. Kesempatan Kerja di Pedesaan Prop.Kal.Sel. LHP, 1996, Studi PATANAS.

desa di Kalsel⁴ adalah penggunaan buruh lepas dengan sistem pengupahan harian dan borongan. Sistem “sambatan” (gotong royong) dan sistem pengupahan tradisional lainnya cenderung menghilang dan digantikan oleh pola hubungan kerja komersil. Petani sampai saat itu belum mengalami kesulitan memperoleh tenaga kerja pertanian. Meski demikian, tetap perlu diantisipasi kecenderungan pola hubungan kerja dan kelangkaan tenaga kerja pertanian di berbagai daerah, sehingga dapat diterapkan kebijakan yang tepat untuk mengatasinya.

Salah satu ciri tenaga kerja di pedesaan adalah rendahnya tingkat pendidikan formal sebagai penyebab rendahnya kreativitas dalam penciptaan kesempatan kerja baru. Tenaga kerja di pedesaan cenderung dianggap sebagai beban ketimbang nilai lebih atau paling tidak hanya sebagai potensi yang belum termanfaatkan, walaupun beberapa perintis (seperti Ir. Sigit Samsu di Jember) telah dapat mengentaskan produksi kedelai sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja. Oleh Sudaryanto, kekuatan di pedesaan adalah keunggulan komunitas, kelemahannya terletak pada kemampuan individu, sehingga yang dilakukan adalah pembangunan dan pembinaan individu di suatu daerah/pedesaan.

Pada dasarnya masalah kesempatan kerja erat kaitannya dengan dengan masalah rendahnya kesempatan kerja dan masalah kemiskinan (Mubyarto, 1976). Tingkat pendapatan dipengaruhi oleh sumberdaya dimiliki (baik berupa modal/lahan, teknologi dan tenagakerja). Sedangkan sebagai variabel dari sumberdaya tenagakerja adalah disamping kualitas yang biasanya diproksi dari pendidikan dan ketrampilan, tidak kalah penting adalah menyangkut waktu kerja yang ditunjukkan melalui lamanya bekerja dan banyak anggota keluarga yang bekerja.

Kesempatan kerja dapat dibahas dengan fokus pada tingkat partisipasi kerja rumah tangga di berbagai jenis pekerjaan yang dihubungkan dengan tingkat pendidikan serta curahan kerjanya pada usahatani maupun berburuh tani. Batasan tingkat partisipasi kerja disini adalah proporsi tenagakerja yang bekerja (di satu sektor) terhadap total tenaga kerja. Hasil penelitian sensus di 8 desa contoh Patanas Jateng (PATANAS, 1996), menunjukkan sebagian besar (62%) anggota rt bekerja di sektor pertanian, 32% bekerja di non pertanian dan sisanya bekerja ganda di kedua sektor tersebut (tabel 2).

⁴ Suryani, E. dan S.H. Susilowati (2000). Pola Hubungan Kerja Pertanian di Pedesaan Kalimantan Selatan; dalam Prosiding (2000). PSE. Bogor.

Tabel 2. Kepadatan Agraris dan Partisipasi Kerja Menurut Sektor di Desa Contah Patanas, Jateng.

Desa	Kepadatan Agraris (orang/Ha)	Partisipasi kerja		
		Pertanian	Non Pertanian	Campuran
<u>Dataran rendah (sawah)</u>				
1.karangwungu	21	37,9	52,6	9,5
2.Larangan	20	63,2	31,3	5,5
3.Karangmoncol	18	56,1	39,8	4,1
4.Mojoagung	12	64,0	31,0	5,0
<u>Dataran Tinggi (T.Kering)</u>				
1.Cepogo	31	49,7	39,8	10,5
2.Kwadungan Gunung	13	85,7	11,6	2,7
3.Karangtengah	11	84,7	11,8	3,5
<u>Pantai</u>				
- Wonokerto Kulon.	51	54,9	44,0	1,1

Sumber: Data Primer diolah.

Tingkat partisipasi kerja di sektor non pertanian di suatu desa berhubungan dengan tingkat kepadatan penduduk agraris. Makin tinggi tingkat pendapatan penduduk agraris, makin banyak penduduk yang bekerja di sektor non pertanian (Sawit, 1985). Artinya makin tinggi tingkat kepadatan penduduk, makin sempit rata-rata luas garapan yang diusahakan, sehingga makin rendah pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian, baik dengan berusaha maupun berburuh tani. Kesempatan kerja di sektor non pertanian seringkali diperlukan kualitas tenaga kerja tertentu yang menyangkut tingkat pendidikan formal dan ketrampilan terlebih bila kesempatan kerja tersebut bersifat formal. Di samping itu, citra petani kurang memberi kebanggaan status sosial (gengsi) terutama bagi generasi muda, dan pengharapan pendapatan seperti yang mereka inginkan.

Alokasi waktu (curahan kerja) bagi setiap anggota rumahtangga untuk bekerja di suatu sektor dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: pemilikan aset produktif, keadaan sosial ekonomi keluarga, tingkat upah dan karakteristiknya (seperti tingkat pendidikan, ketrampilan, dan umur). Keputusan untuk berusaha dengan aset produktif yang dimiliki atau berburuh sesuai dengan modal tenaga kerja atau berusaha ganda, dipengaruhi oleh besarnya insentif dan tingkat kecukupan rumahtangga secara ekonomi.

Perkembangan jumlah penduduk yang berbeda antar daerah, mengakibatkan penyediaan tenaga kerja pedesaan semakin timpang dan cenderung timbul kesenjangan yang semakin besar antara mereka yang mampu dan tidak mampu mengisi peluang kerja. Jika laju lapangan kerja tidak bisa mengimbangi laju pertumbuhan tenaga kerja maka pada pasar tenaga kerja semakin cenderung ke arah penurunan tingkat upah. Demikian juga dengan perkembangan teknologi dapat berpengaruh positif ataupun negatif terhadap kesempatan kerja. Variasi mata pencaharian terhadap curahan tenaga kerja untuk memperoleh pendapatan sangat tergantung beberapa faktor, diantaranya: faktor alami, aktivitas perekonomian yang ada, kemampuan permodalan dan potensi tenaga kerja yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Perbedaan agroekosistem secara langsung akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja dan partisipasinya

terhadap kesempatan kerja untuk memperoleh pendapatan dari berbagai sumber mata pencaharian.

Secara teoritis kesempatan kerja dapat di ukur dengan '*participation rate*', '*duration rate*' dan '*labour utilization*'. '*Duration rate*' adalah pengukuran kesempatan kerja berdasarkan curahan kerja (jam/hari, hari kerja/minggu, /bulan, /tahun). Konsep '*labour utilization*' ditunjukkan untuk mengukur sejauh mana pekerja memperoleh pekerjaan dan imbalan jasa selaras dengan keahlian atau kualitas tenaga kerja yang bersangkutan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi peluang untuk mengisi kesempatan kerja pada usahatani antara lain: a)perubahan teknologi yang mempengaruhi perubahan intensitas tanam, perubahan pranata sosial dan kelembagaan yang ada di pedesaan; b)kondisi agroekosistem yang dapat memberikan perbedaan penyerapan tenagakerja dan produktivitas tenaga kerja maupun pengalihan tenaga ke sektor lain di luar pertanian; c)peranan ekonomi wilayah, yang terkait dengan aksesibilitas wilayah, yang pada gilirannya mendorong penduduk untuk melakukan migrasi ke luar desa untuk mengisi kesempatan kerja yang ada; d)pemilikan modal, terutama aset lahan yang mampu menyerap tenaga sampai batas maksimal antara besarnya luas lahan dan tekanan jumlah penduduk; dan e)tingkat ketrampilan dan kemampuan yang berkaitan dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk desa, dan pada gilirannya peranan tersebut mempunyai pengaruh terhadap besarnya curahan tenaga kerja.

Kesempatan kerja di luar sektor pertanian yang bisa memberi pendapatan keluarga yang lebih besar, kecuali pada daerah dengan aksesibilitas yang rendah dan kurang terjangkau oleh lembaga ekonomi, kesempatan kerja hanya terbatas pada sektor pertanian sebagai sektor andalan. Selain faktor intensitas tanam, luas lahan garapan yang diusahai diduga berpengaruh terhadap besarnya curahan tenaga kerja. Masalah curahan tenaga kerja berburuh tani di pedesaan tidak terlepas oleh kesempatan kerja tersedia di daerah tersebut, serta pemilikan faktor produksi yang sangat terbatas (rumahtangga dengan hanya tenaga kerja sebagai faktor produksi, maka pendapatan mereka hanya ditentukan oleh tingkat upah yang berlaku di desa tersebut). Perkembangan kegiatan buruh tani terkait erat dengan luas lahan pertanian, produktivitas tanah, intensitas tanam dan teknologi yang ditetapkan.

Adanya ketidak seimbangan di pasar tenaga kerja disebabkan oleh jumlah tanah yang terbatas serta terbatasnya kesempatan kesempatan kerja di luar pertanian dan angkatan kerja akan terus meningkat dengan berkembangnya jumlah penduduk. Oleh karenanya, akan timbul kondisi tenaga kerja yang tersedia belum mampu mengisi peluang yang ada dan akhirnya akan menjadi pengangguran terselubung. Akhirnya, akan timbul pemanfaatan tenaga kerja yang kurang produktif mengakibatkan pilihan terakhir untuk mengisi kesempatan kerja yang ada sebagai buruh tani atau buruh kasar lainnya. Pada lima desa contoh menunjukkan kontribusi curahan tenaga kerja terbesar dinominasi oleh usaha

ternak dan berburuh tani (6,9% hingga 98,7% untuk usaha ternak dan 41,6 hingga 86,8% untuk kegiatan berburuh). Hal ini mengindikasikan kesempatan usaha berburuh tani dan usaha ternak berpeluang untuk mengisi kesempatan kerja di pedesaan, atau pada kondisi tekanan jumlah penduduk dan semakin sempitnya penguasaan lahan garapan akibat fragmentasi, polarisasi dan perpencaran lahan mendorong petani yang berlahan sempit akan bekerja sebagai buruh tani atau bekerja di luar sektor pertanian.

Penyerapan tenaga kerja di luar sektor pertanian di pedesaan cenderung sebagai tenaga buruh kasar (kurang membutuhkan ketrampilan dan pendidikan formal), hanya pada pengalaman yang mereka kuasai. Banyak penduduk desa sebagai pedagang dengan skala usaha kecil-kecilan termasuk pedagang pasar hasil pertanian, pedagang keliling, pedagang di kios/warung; berburuh sebagai buruh tukang kayu dan batu; atau pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan keahlian seperti: guru; serta yang memiliki ketrampilan di dalam menjual jasa (sebagai tukang beca dan ojek). Untuk buruh industri, sebagai buruh pembuat bata merah, genteng atau buruh kerajinan di industri rumah tangga. Ada juga sebagai buruh industri di luar desa dengan cara menjadi migrasi sekuler maupun komutasi, di samping pekerjaan formal lainnya sebagai PNS, ABRI, karyawan dan sebagainya.

Di Sulawesi Selatan, bekerja di sektor pertanian juga telah menunjukkan tendensi penurunan. Kondisi tersebut menimbulkan praduga bahwa penurunan kesempatan kerja di pertanian karena adanya inovasi berbagai peralatan teknologi usahatani serta semakin berkembangnya diversifikasi lapangan pekerjaan sejalan dengan proses pembangunan di pedesaan. Berbagai tantangan seperti masih rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki penduduk, sehingga dengan kondisi laju pertumbuhan penduduk yang besar dapat menyebabkan peningkatan angkatan kerja secara absolut dan permasalahan semakin kompleks. Pembangunan pertanian merupakan proses dinamis yang membawa berbagai perubahan dan pergeseran yang perlu diantisipasi segera seperti perubahan kesejahteraan para petani, yang dalam hal ini terkait langsung dengan pola perubahan dan pergeseran kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi penduduk di pedesaan. Sementara itu, dengan keterbatasan pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki, maka kegiatan usahatani dan buruh tani merupakan kesempatan kerja yang lebih memungkinkan dan masih terbuka serta potensial bagi penyerapan tenaga kerja keluarga walau harus diakui bahwa tingkat produktivitas kerja umumnya relatif masih rendah.

Kesempatan kerja dan sumber pendapatan di Sulawesi Selatan, dimana di desa yang berbasis lahan sawah sebahagian besar (97,7%) KK sebagai petani dan buruh tani; buruh non pertanian dan jasa sebesar 0,7%. Di desa berbasis lahan tegal (palawija dan hortikultura) mata pencaharian KK sebagai petani (88,9%) dan sebagai pegawai (karyawan bagian administrasi desa dan lembaga lainnya) sebesar 9,8% dan sisanya (1,3%) sebagai karyawan/tenaga kerja di bidang jasa. Di desa berbasis perkebunan dan pertambakan umumnya bekerja sebagai petani dan buruh perkebunan dan pertambakan. Sumber mata

pencaharian pokok masih bertumpu pada sektor pertanian sekitar 90% dengan kisaran tertinggi di basis usahatani sayuran dataran tinggi sedangkan terendah di desa basis usahatani padi sawah tadah hujan dengan pola tanam padi-kedele. Sesuai dengan pola kesempatan kerjanya, maka tingkat pendapatan rumah tangga pedesaan sebahagian besar berasal dari usahatani komoditas (tabel 3).

Tabel 3. Penyerapan Tenaga Kerja Pedesaan Berdasar Lapangan Kerja di Desa Patanas, Sulsel, 1995.

Kategori Desa Contoh	Usaha Pertanian	Usaha Non Pertanian					
		Dagang	Bangunan	Industri	Angkutan	Jasa	Total
1.Padi (sawah irigasi)	87,0	4,1	2,9	1,6	1,7	2,7	13,0 (68,2)
2.Padi (sawah t. hujan)	88,1	3,6	3,2	-	2,8	2,3	11,9 (82,4)
3.Palawija (lahan kering)	92,8	1,9	2,4	-	1,9	1,0	7,2 (74,3)
4.Sayuran (lahan kering)	93,7	1,2	0,6	-	1,8	2,7	6,3 (87,2)
5.Perkebunan (l. kering)	91,7	1,2	-	2,2	1,3	3,6	8,3 (87,7)
6.Perikanan	90,8	4,4	-	1,3	0,6	2,9	9,2 (83,3)

Ket.erangan: (...) angka persentase tenaga kerja pria.

Penyerapan tenaga kerja di desa contoh masih sangat besar, di desa lahan sawah irigasi Margolembo 64,69% dan Paseno 90,21%. Di Selli (sawah tadah hujan) menyerap kesempatan kerja 82,58%. Desa Ka'do dan Batupanga (perkebun kopi dan coklat) menyerap kesempatan kerja 79,64% dan 98,82%. Desa Baroko (sayuran) menyerap 66,30% desa Palamean (perikanan) menyerap kesempatan kerja 85,99%. Perkembangan kegiatan non pertanian masih berupa usaha tradisional seperti perdagangan (warung, hasil pertanian), tenaga bangunan, angkutan dan lainnya yang relatif tidak memerlukan keahlian tinggi. Implikasinya adalah pengembangan sektor pertanian di pedesaan akan memiliki arti strategis bila diarahkan ke sistem agribisnis melalui pola kemitraan usaha dan pengembangan agroindustri. Jenis pekerjaan juga dapat dikategorikan menurut tipe iklim daerah (tipe A, B, C, D dan E)(tabel 4).

Tabel 4. Persentase Anggota Rumah Tangga Menurut Status Pekerjaan dan Tipe Iklim, Patanas. 1983 (%)

Sumber Matapencarian	Tipe Iklim dan Status Pekerjaan									
	A		B		C		D		E	
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T
1.Pertanian										
-Petani pengelola	70,1	29,9	71,1	28,9	77,9	22,1	69,6	30,4	87,4	22,6
-Buruh tani	82,0	18,0	71,0	28,0	53,8	46,2	91,4	8,6	71,3	28,7
2.Industri Rumah Tangga										
-Pengelola	88,2	11,8	64,5	35,5	58,3	41,7	87,5	12,5	75,0	25,0
-Buruh	85,7	14,3	95,1	4,9	75,0	25,0	100	0	100	0
3.Perdagangan	78,9	21,1	64,6	35,4	68,6	31,4	59,1	40,9	69,7	30,3
4.Bangunan										
-Buruh	67,7	33,3	65,8	34,2	50,9	49,1	80	20	50,0	50,0
5.Angkutan										
-Buruh	66,7	33,3	76,3	23,7	73,5	26,5	77,8	22,2	50,0	50,0
6.Jasa	75	25,0	90,8	9,2	62,5	37,5	92,8	7,1	66,7	33,3
7.Pegawai	82,1	17,9	85,5	14,2	77,4	22,6	73,1	26,9	60,0	40,0

Keterangan: P = sebagai pekerjaan pokok; T = sebagai pekerjaan tambahan.

Migrasi, Mobilitas Ketenagakerjaan, dan Pola Hubungan Kerja di Pedesaan

Pembangunan yang dilaksanakan dapat menyebabkan terjadinya perubahan pesat di pedesaan seperti arus migrasi ke kota, berkembangnya aktivitas non pertanian, kelangkaan tenaga kerja dan kenaikan upah pertanian, konversi tanah, akumulasi tanah terutama yang berdekatan dengan kota, berkembangnya lembaga perbankan dan sebagainya yang semuanya membawa pengaruh positif dan negatif pada penguasaan tanah dan hubungan kerja di sektor pertanian yang membawa implikasi pada peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan. Semakin terbatasnya lahan pertanian sementara angkatan kerja di pedesaan terus bertambah, maka kesempatan kerja di luar sektor pertanian seperti: jasa, perdagangan dan industri menjadi semakin penting keberadaannya sebagai sumber pendapatan bagi rumah tangga masyarakat pedesaan.

Di Sulsel, bentuk hubungan/ikatan kerja antara petani (majikan) dan buruh dapat berupa buruh tetap, langganan, ceblokan dan buruh lepas, baik harian maupun borongan. Terjadi pergeseran dan transformasi nilai di kalangan masyarakat terhadap semakin meningkatnya angkatan kerja perempuan dan kesempatan kerja bagi mereka sebagai salah satu dampak dari ekspansi kegiatan pendidikan formal dan non formal sampai ke pelosok pedesaan. Lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja pada sektor non pertanian memiliki nilai status bagi masyarakat di pedesaan seperti: menjadi pegawai negeri (guru, pegawai pemerintahan atau pamong praja), kegiatan perdagangan dan industri. Selanjutnya diikuti jasa angkutan dan bangunan yang cukup banyak menyerap tenaga kerja pedesaan. Tingkat partisipasi rumah tangga yang anggotanya melakukan migrasi 6,62%; di masing-masing desa adalah: Margolembo (18,75%), Paseno (0,65%), Selli (17,39%), Rumbia (11,88%), Ka'do (1,91%), Batupanga (0,0%), Baroko (5,63%), Palamean (5,66%).

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya migrasi ke kota (pusat perekonomian) seperti: produktivitas lahan yang rendah, terbatasnya lahan dan lapangan pekerjaan, tingkat upah yang diterima rendah dan tuntutan hidup/keluarga untuk lebih meningkatkan pendapatan keluarga. Di samping berbagai faktor lain seperti: a)kegiatan pertanian yang bersifat musiman; b)komersialisasi tidak saja dalam usahatani tetapi juga dalam pola konsumsi; c)adanya gejala *under-employment* di pedesaan; d)perkembangan perekonomian desa yang semakin terbuka akibat semakin baiknya aksesibilitas pedesaan terhadap pusat-pusat ekonomi serta lancarnya arus informasi dan komunikasi; e)pengaruh oleh jenis lahan (kesuburan lahan), jenis usahatani (komoditas) yang diusahakan di desa asal dan jenis pekerjaan di tempat tujuan.

Beberapa faktor penarik dalam kegiatan migrasi, selain tingkat pendapatan, yaitu jarak daerah kerja, kesempatan kerja yang ada dan sesuai dengan tenaga kerja yang tersedia dan tempat migrasi untuk melakukan kegiatan (menetap, menginap, pulang pergi). Ada juga faktor pendorong diantaranya adalah Terjadinya perubahan maupun pergeseran pada pola kesempatan kerja dan kesempatan kerja selain dipengaruhi nilai status suatu jenis

pekerjaan, juga menjadi tolok ukur adalah bekerja di sektor non pertanian adalah tingkat upah yang biasanya lebih tinggi dan perubahan pemilikan asset pertanian sehingga harus mencari sumber tambahan bagi pendapatan rumah tangganya. Dari kondisi demikian, terjadi mobilitas tenaga kerja pedesaan terhadap kesempatan kerja yang terdapat di luar desanya.

Mobilitas penduduk yang terkait dengan mencari pekerjaan di sektor pertanian, pada umumnya sudah jarang dilakukan oleh penduduk desa contoh, kecuali penduduk desa Sampalan yang berburuh panen di desa tetangga. Mobilitas penduduk terutama ditujukan untuk mencari pekerjaan di sektor non-pertanian (sebagai buruh industri, tukang bangunan/kayu), berjualan. Mobilitas penduduk bersifat sirkulasi terutama ke kota-kota besar (Bandung, Cirebon, Jabodetabek dan kota kabupaten masing-masing). Distribusi migran, lebih banyak melakukan migrasi komuter sepanjang tahun dan sirkulasi pada masa-masa tertentu. Dominasi jenis pekerjaan yang sering dilakukan migran adalah sebagai buruh tani/helayan, buruh industri dan bangunan atau sebagai pekerja jasa seperti angkutan (ojek) dan tenaga profesional. Pola hubungan kerja di pasar tenaga kerja di pedesaan contoh di Jawa Barat (2000) dalam kegiatan usahatani khususnya padi yang dilakukan petani adalah transaksi dengan sistem buruh lepas (49%), dibanding tahun 1983 sebesar 43% terjadi peningkatan dengan tingkat perubahan sebesar 8,7% dari sebelumnya.

Mobilitas penduduk bersifat *komutasi* terutama terkait dengan kegiatan anak sekolah, karyawan, tukang ojek dan juga ditemukan pada pedagang, tukang kayu/bangunan yang dijalani (dilaju) setiap hari karena tempat bekerja masih di sekitar desa kecamatan tempat berdomisili. Mobilitas penduduk yang tinggi didominasi oleh tenaga kerja muda baik pria maupun wanita. Terdapatnya penduduk desa contoh yang pergi ke luar negeri (terutama wanita muda) yang bekerja sebagai TKI (di Arab Saudi, Malaysia, Brunei dan Asia lainnya). Desa-desa tersebut antara lain Nagrak, Pagelaran, Karang Jaladi, Kelapa Sawit, Pamoyanan, Cipanas dan Rajasinga.

Pasaribu, dkk (1996), menyimpulkan beberapa hal terkait dengan arah dan pola migrasi tenagakerja, seperti: 1)arah migrasi adalah ke kota kabupaten dan propinsi yang menawarkan variasi pekerjaan yang lebih beragam, dengan tujuan utama memperoleh tambahan pendapatan (uang tunai); 2)pola dan intensitas migrasi akan terkait dengan variasi pekerjaan yang dituju dan diperoleh; 3)kekurangan tenaga kerja umumnya terjadi pada agroekosistem lahan sawah di Jawa ternyata tidak berpengaruh terhadap luas garapan dan mobilitas tenaga kerja antar desa, karena mekanisme pengolahan lahan dan panen sudah cukup berkembang; 4)kelangkaan tenaga kerja umumnya di luar Jawa karena adanya migrasi tenaga kerja produktif ke luar sektor pertanian karena insentif tingkat upah yang lebih tinggi.

Sudana, dkk. dan Syafaat, dkk (2000)⁵, mengemukakan profil dan dampak mobilitas angkatan kerja terhadap ekonomi pedesaan, yaitu: 1)pada agroekosistem lahan kering di

⁵ Dalam: Prosiding. PSE. Bogor. (2000).

Jawa dan luar Jawa, faktor kondisi ekonomi rumah tangga merupakan determinan penting pendorong migrasi; 2) kegiatan migrasi dan pertanian merupakan kegiatan terpisah, yang diindikasikan oleh adanya pergeseran pola migrasi komuter dan sirkuler ke pola menetap dan jenis pekerjaan permanen seperti buruh bangunan dan usaha jasa; 3) struktur kesempatan kerja pedesaan didominasi oleh sektor pertanian dan faktor pendorong migrasi adalah penguasaan lahan yang sempit, kegiatan pertanian bersifat musiman, rendahnya produktivitas tenaga kerja, dan aksesibilitas fisik wilayah yang relatif baik khususnya di Jawa; 4) mobilitas tenaga kerja dicirikan oleh pergerakan tenaga kerja dari sektor dengan produktivitas rendah (pertanian) ke sektor dengan tingkat produktivitas tinggi (manufaktur) dengan konsekuensi kelangkaan tenaga kerja berkualitas di pedesaan; dan 5) dampak lebih jauh dari kelangkaan tenaga kerja pertanian ini adalah adanya perubahan pola kegiatan pengolahan/pengusahaan usahatani, peningkatan upah tenaga kerja, perubahan sistem pengupahan, dan pola hubungan kerja pertanian.

Sementara itu, hubungan kerja pertanian dewasa ini cenderung berkembang ke arah bekerjanya sistem pasar melalui sistem pengupahan yaitu ke sistem pengupahan borongan. Fenomena kecenderungan tersebut terjadi pada lahan sawah, seiring dengan semakin ketatnya pengaturan waktu tanam dan penerapan mekanisasi pertanian, traktorisasi dalam pengolahan tanah, serta penggunaan mesin perontok dalam kegiatan pasca panen. Di Jawa Timur dan berbagai daerah lain, ditemukan pola hubungan kerja dipengaruhi oleh kekuatan *supply dan demand* tenaga kerja. Pada daerah langka tenaga kerja, tingkat upah akan lebih tinggi ketimbang daerah yang surplus tenaga kerja, pada kondisi daerah dan basis komoditas yang sama.

Sistem borongan cenderung berkembang pada daerah yang mengalami kelangkaan (defisit) tenaga kerja, dekat dengan pusat industri, dan siklus produksi yang semakin cepat pada daerah usahatani tambak. Bentuk hubungan kerja yang umum dikenal di daerah tersebut adalah hubungan kerja yang tidak terikat dengan upah harian dan borongan. Khusus di daerah perkebunan dan ternak berlaku upah buruh tetap dengan pembayaran mingguan dan dua mingguan. Upah panen pada umumnya memakai sistem bawon dengan kisaran 1:5 sampai dengan 1:10. Upah bawon di daerah padi sawah dataran rendah pada umumnya lebih besar dibandingkan di daerah padi sawah dataran tinggi. Seiring dengan terjadinya pergeseran dan peningkatan tingkat pendidikan, serta makin tinggi dan makin baiknya tingkat aksesibilitas suatu desa dengan daerah ekonomi di sekitarnya, terutama setelah tahun 2000-an, jumlah yang bekerja di sektor pertanian semakin tergeser dan mengarah ke sumber mata pencaharian di sektor non pertanian, terutama untuk mereka yang berpendidikan SLTP ke atas dan berumur di bawah 30 tahun.

Pola hubungan kerja antara majikan dengan buruh (pekerja) tampak sangat intensif dilaksanakan, khusus untuk kegiatan persiapan lahan, tanam, dan panen, yang kebanyakan sebagai buruh lepas dengan upah harian, yang banyak dipekerjakan pada MH terutama di

sentra produksi padi (Sumber Rejo) dan sepanjang tahun pada perkebunan tebu (Kota Napal). Hubungan kerja yang baik antar anggota di dalam satu kelompok tani melahirkan sistem hubungan kerja baru, yaitu *arisan tenaga kerja*, khusus untuk kegiatan panen. Karena sifatnya arisan, maka anggota yang melakukan pemanenan (padi) saat ini tidak memberikan upah uang tunai, tetapi menjadi kewajibannya untuk bekerja di lahan anggota lainnya apabila waktunya panen.

Transaksi hubungan kerja lainnya yang masih berlangsung adalah buruh langganan (8,0%), buruh tetap (7,4%), ceblokan (4,1%), sambatan (0,4%) dan gotong royong (0,9%). Terjadi peralihan dari pertukaran tenaga kerja dan sosial (sambat-sinambat dan gotong royong) kepada tenaga kerja yang dibayar (buruh langganan dan buruh lepas); yang tercermin pada pola sistem pengupahan yang diterapkan, yaitu pembayaran upah secara upah harian (33,2%), upah bawon (21,1%) dan upah borongan (17,3%). Pembayaran upah harian dan borongan umumnya diterapkan pada kegiatan pengolahan tanah dan tanam, khususnya dalam usahatani padi sawah yang dewasa ini berkembang penggunaan traktor dan kelompok kerja tanam.

Keragaan hubungan kerja dalam usaha ternak sapi perah (desa Margamukti), transaksi yang terbanyak dipakai adalah buruh tetap (86,4%). Sedangkan buruh lepas hanya sebesar 9,4% dan bangunan 4,2%. Dengan kondisi ini, sistem pengupahan yang dominan diterapkan adalah upah bulanan (72,3%), karena mengacu pada pola produksi dan sistem penjualan produknya. Di UHP Banyuwangi, sebagian besar usahatani dilakukan dengan sistem “kedokan”, pengedok tidak responsif terhadap tabella karena curahan perhatian dan hari kerja bertambah sedangkan pengedok umumnya bekerja pada beberapa pemilik tanah. Hubungan kerja ini sudah berlangsung bertahun-tahun, karena pemilik tanah enggan mengorbankan pengedok. Faktor sosial yang berlaku di pedesaan berpengaruh terhadap adopsi teknologi baru. Petani pemilik-penggarap umumnya memberi respon lebih positif, sedang petani penyewa dan petani penyakap lebih berhati-hati.

Sementara itu, di daerah perikanan, tingkat partisipasi tenaga kerja keluarga petani maupun nelayan masih rendah, berarti kesempatan kerja di desa pantai adalah terbatas, tidak selalu karena sumberdaya alam yang terbatas, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor aksesibilitas, kapital, teknologi, dan faktor sosial budaya yang kurang mendukung terciptanya kesempatan kerja dan peluang berusaha di desa pantai tersebut. Keterbatasan tingkat partisipasi tenaga kerja menyebabkan jenis usaha yang dikembangkan harus mampu meningkatkan kesempatan kerja secara signifikan bagi masyarakat desa nelayan. misalnya meningkatkan intensitas dan variasi kegiatan penangkapan ikan. Beberapa jenis kegiatan ekonomi yang potensial di desa pantai, seperti: 1)sumber daya perairan (penangkapan ikan, budidaya ikan); 2)sumberdaya lahan (tambak udang, pertanian/tanaman pangan); 3)agroindustri (pengolahan ikan). Terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di luar perikanan, terkadang menyebabkan kegiatan usahatani sebagai usaha sampingan.

Beberapa aspek yang digunakan sebagai dasar pertimbangan pemilihan usaha yang akan dikembangkan, yakni 1) ketersediaan sumberdaya alam; 2) teknologi; 3) sosial budaya; 4) pasar input-output usaha tersebut; dan 5) kesempatan kerja.

Usaha perikanan yang dominan di daerah perikanan adalah usaha perikanan tangkap. Berdasar pada tingkat aksesibilitas masyarakat desa/petani kepada sumber modal permodalan yang tersedia, ternyata pemanfaatan serta akses terhadap lembaga finansial yang bersifat formal, khususnya Bank, masih sangat terbatas sekali. Kesempatan kerja di luar perikanan yang terbuka, yaitu sebagai buruh pabrik dan industri, dengan akses yang cukup baik karena berlokasi dekat dengan desa mereka. Diduga kesempatan-kesempatan ekonomi kurang tersedia. Sumber pendapatan lain di luar perikanan adalah berupa kegiatan yang masih terkait dengan perikanan seperti pedagang ikan, pengolahan ikan dan sebagai buruh pada pengolahan ikan. Dengan perkembangan skala usaha, selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga memberikan kesempatan kerja bagi nelayan kecil.

Untuk wilayah pinggiran perkotaan, pengembangan pertanian ternyata memegang peranan penting, terutama menampung pengangguran. Lahan yang digarap umumnya merupakan lahan terlantar (lahan tidur) milik negara, pengembang perumahan maupun perorangan. Dari usahatani sayuran (kangkung, caisim dan selada), petani contoh di Jakarta mampu memperoleh penerimaan bersih sebesar Rp.13,9 juta/tahun dengan curahan tenaga kerja 871 HOK/tahun (55% tenaga kerja keluarga). Sedangkan penerimaan petani dari usaha tanaman hias sebesar Rp.5 juta/tahun dengan curahan tenaga kerja 365 HOK/tahun (30% tenaga upahan). Di Surabaya, pendapatan petani sayuran pinggiran kota (sawi, kangkung dan bayam) sebesar Rp.12,2 juta/tahun dengan curahan tenaga kerja 632 HOK/tahun (85% tk keluarga). Pada petani tanaman hias, penerimaan bersih Rp.8,8 juta/tahun dengan curahan tenaga kerja 487 HOK/tahun (43% tenaga upahan). Penerimaan bersih petani anggrek pot Rp.10,4 juta dengan curahan tenaga kerja 458 HOK/tahun (32% tenaga upahan), sedangkan di Jawa Barat Rp.8,3 juta/tahun dengan 435 HOK/tahun (8% tenaga upahan). Pendapatan yang relatif baik, apalagi bila kualitas pengelolaannya ditingkatkan.

Terdapat kecenderungan mulai bergesernya sumber pendapatan dari pertanian ke non pertanian, terutama perdagangan dan jasa, yang utama sebagai tenaga professional/tenaga tata laksana (PNS, ABRI, Pegawai Swasta, yang tergolong sebagai pekerja formal) yang mengindikasikan tingkat pendidikan di daerah tersebut relatif tinggi. seperti yang dikemukakan pada Tabel 5.

Tabel 5. Persentase Anggota Rumah Tangga Menurut Sumber Pendapatan dan Tipe Iklim (%)

Sumber Pendapatan	Tipe Iklim dan Status Pekerjaan				
	A	B	C	D	E
1. Petani	90,3	86,9	79,7	72,9	81,5
2. Buruh tani	33,7	38,5	41,0	47,2	28,5
3. Industri Rumah Tangga	2,0	6,7	5,0	2,3	3,5
4. Bangunan	2,2	5,2	12,0	1,5	1,0
5. Angkutan	1,0	5,2	8,3	0,8	2,0
6. Perdagangan	15,4	23,4	23,0	23,9	20,5
7. Jasa	7,7	14,4	16,5	5,6	4,0
8. Menyewakan asset	2,0	7,5	4,0	5,5	19,5
9. Pensiunan	4,2	2,7	2,0	0	0,5
10.Sumbangan	3,5	1,6	1,7	1,2	0,0
11.Lainnya	0,2	2,5	2,0	0,2	0,5

Sumber: Data Primer diolah dan diperkaya dengan data ketenagakerjaanBPS.

Berdasarkan sumber pendapatan selama periode 1983-2000, peran pendapatan pertanian semakin tergeser karena perkembangan usaha non pertanian (dagang, warung, buruh bangunan, jasa angkutan) yang tidak memerlukan keahlian tinggi (tabel 6).

Tabel 6. Distribusi Anggota Rumahtangga (%) Menurut Sumber Matapencaharian Utama, Status Pekerjaan, dan Tipe Iklim di Desa Sensus Patanas Jawa Barat, 2000.

Status Pekerjaan	Tipe Iklim dan Sumber Pendapatan										Sub Total		Total P+NP
	A		B		C		D		E		P	NP	
	P	NP	P	NP	N	NP	P	NP	P	NP			
Tidak bekerja	0,7	61,6	0	0	0,7	42,9	0,6	63,2	1,2	78,7	0,5	19,7	20,2
Pengus.+upahan	0,7	0,5	0,8	0,1	1,7	0,4	0,1	0,1	0	0	0,2	7,8	8
Us.sendiri+upahan	29,5	1,2	30,3	4,2	32,7	2,4	12,9	1,1	11,2	0,1	9,5	1,2	10,7
Us.sendiri+Tk.DK	3,9	3,1	7,6	7,7	9	10,1	4,1	1,7	0	0,6	2,2	0	2,2
Usaha sendiri	2,8	9,8	8,3	24,7	4,2	16,1	7,2	16	22,4	15,6	2,2	11	13,2
Tk.DK tdk dibayar	9,4	0,9	21,9	5,4	26,4	10,8	2,7	1,1	3,1	0,1	2,9	2,3	5,2
Buruh Upahan	53	22,9	31,1	57,9	25,3	17,3	72,3	16,8	62,1	4,9	20,7	19,8	40,5
Jumlah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	38,2	61,8	100
(n)	434	581	1164	1223	288	759	76	1137	161	703	2723	4403	7126

Keterangan: P = Pertanian; NP = Pertanian.

Di antara tipe wilayah tipe iklim, mata pencaharian di sektor pertanian dengan status buruh upahan yang terbesar pada tipe iklim D (72%), E (62%), dan A (53%), sebaliknya di sektor non pertanian yang terbesar adalah pada tipe iklim B (69%). Semakin rendah luas lahan dan tingkat pendidikan, maka semakin beraneka ragam sumber pendapatan di suatu daerah (dalam daerah maupun bermigrasi ke luar daerah). Di sisi lain, ragam sumber pendapatan berkaitan dengan tujuan seorang individu untuk melakukan jenis pekerjaan guna memperoleh pendapatan keluarga. Selain itu, diperoleh juga pendapatan dari aset berharga yang dikuasai, sumbangan atau pemberian dari pihak lain dan pensiun. Akumulasi dari berbagai sumber pendapatan tersebut adalah merupakan pendapatan keluarga dalam satu rumah tangga (tabel 7).

Tabel 7. Distribusi Anggota Rumahtangga (%) Menurut Sumber Matapencaharian Sampingan, Status Pekerjaan, dan Tipe Iklim di Desa Sensus Patanas Jawa Barat, 2000.

Status Pekerjaan	Tipe Iklim dan Sumber Pendapatan										Sub Total		Total P+ NP
	A		B		C		D		E		P	NP	
	P	NP	P	NP	N	NP	P	NP	P	NP			
Tidak bekerja	0	0	0	0	2,5	15,3	0	0	0	7,7	0,4	1,3	1,7
Pengus.+upahan	1,6	0	0,5	1,2	0,4	0,8	0	0	0	23,1	0,5	0,2	0,7
Us.sendiri+upahan	16,5	33,3	22,0	43,2	10,3	23,4	17,4	18,4	7,1	7,7	11,5	11	22,7
Us.sendiri+Tk.DK	7,4	3,3	11,6	8,4	24,0	8,1	13,0	13,1	7,1	23,1	9,3	2,9	12,2
Usaha sendiri	5,3	13,30	17,4	19,2	21,9	12,1	18,7	21,0	42,8	0	11,9	5,8	17,7
Tk.DK tdk dibayar	10,1	0	9,7	8,4	20,2	20,9	0	2,6	0	0	7,3	3,3	10,6
Buruh Upahan	59,0		38,7	19,6	20,6	19,3	40,8	44,7	42,8	38,4	25,6	8,6	34,2
Jumlah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	66,5	34,6	100
(n)	188	30	413	250	242	124	115	76	14	13	972	490	1464

Keterangan: P = Pertanian; NP = Pertanian.

Partisipasi anggota keluarga usia kerja secara agregat cenderung meningkat di sektor non pertanian sebagai pekerjaan utama, dan cenderung menurun di sektor pertaniann sehingga ditafsirkan partisipasi tenagakerja makin didersivikasikan ke non pertanian. Aktivitas non pertanian yang banyak menampung tenaga kerja sebagai sumber utama pendapatan adalah usaha perdagangan skala kecil, buruh di sektor riil dan kontruksi serta di bidang jasa lainnya yang bersifat non formal; dimana dinamikanya sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik internal maupun eksternal. Meskipun telah terjadi peningkatan kualitas pendidikan tenaga kerja pedesaan, naum yang banyak terserap di kedua sektor umumnya adalah tenaga kasar yang tidak memerlukan pendidikan tinggi.

Meningkatnya partisipasi tenaga kerja ke sektor non pertanian, perlu diikuti dengan kebijakan yang kondusif untuk mempercepat perkembangan kesempatan kerja non pertanian di pedesaan. Relevan dengan kondisi saat ini, perkembangan agroindustri skala kecil dan menengah di pedesaan perlu diprioritaskan. Menurunnya partisipasi rumah tangga dalam bermigrasi pada kondisi krisis ekonomi dewasa ini dapat disebabkan oleh berkurangnya daya tarik kota karena berkurangnya atau semakin terbatasnya lapangan pekerjaan di kota.

Ditemukan fenomena bahwa peningkatan ART yang berburuh tani diikuti oleh penurunan petani sebagai pekerjaan utama dan peningkatan pangsa ART yang bekerja di sektor non-pertanian, yang terjadi di Jawa Tengah, NTB, dan Sulawesi Selatan, baik di agrosistem sawah maupun lahan kering. Pertambahan tenaga kerja di sektor pertanian umumnya bekerja sebagai buruh tani, yang kehadirannya sedikit tidak mempengaruhi kelembagaan dan pola hubungan kerja di pedesaan. Kelembagaan seperti sakap menyakap, maro, dan kedokan semakin sulit ditemukan, dan sistem upah dan sistem sewa semakin berkembang. Berbagai perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh semakin terbukanya wilayah pedesaan terhadap kegiatan industri, baik dalam bentuk banyaknya penduduk yang menjadi buruh pabrik di kota atau juga karena industrialisasi di pedesaan. Makin langkanya tenaga kerja pertanian, serta hilangnya kelembagaan seperti sakap, maro, dan kedokan, di desa Terungkulon, Sidoarjo, Jatim. Pada masa krisis ekonomi, pergeseran tenaga kerja dari berbagai sektor kembali ke sektor pertanian dan secara geografis dari kota ke desa, banyak

dipengaruhi oleh sifat pertanian yang lentur dan sifat masyarakat pedesaan yang mau berbagai dengan sesamanya (lihat tabel 8).

Tabel 8. Persentase Angkatan Kerja Menurut Jenis Lapangan Pekerjaan dan Agroekosistem, di Jawa Barat.

Lapangan Pekerjaan/Matapencapaian	Zona Agroekosistem (%)				Total
	SDR	SDT	LK	DP	
I. Pertanian					
1.Usahatani/nelayan	28,5	33,0	31,3	24,6	29,5
2.Buruh tani/nelayan	12,4	10,4	28,0	44,6	21,5
Sub Total	40,9	43,4	59,3	69,2	51,0
II. Usaha Non pertanian					
1.Us.industri	12,4	2,4	1,7	0,7	5,1
2.Us.dagang	13,6	18,9	10,8	11,9	14,1
3.Us.jasa	1,8	1,3	0,3	1,9	1,4
Sub Total	27,8	22,6	12,8	14,5	20,6
III.Buruh Non pertanian					
1.Buruh industri	6,0	6,6	1,7	2,6	4,6
2.Buruh angkutan	5,8	7,2	4,0	3,4	5,3
3.Buruh bangunan	2,5	5,9	4,4	1,5	3,6
4.Buruh perdagangan	2,3	2,1	-	0,4	1,4
5.Buruh us.jasa	11,0	4,5	4,0	5,2	6,6
Sub Total	27,6	26,3	14,1	13,1	21,5
IV. Pekerja Profesional/karyawan/PNS	3,7	7,7	13,8	3,2	6,9
T O T A L: (%)	100	100	100	100	100
(n)	435	376	297	269	1377
Jumlah angkatan kerja	568	524	398	450	1940
Persentase yang bekerja	76,6	71,7	74,6	59,8	71,0

Keterangan: SDR=sawah dat.rendah; SDT=sawah dat.tinggi; LK=lahan kering; DP=desa pantai.

Teknologi Sistem Usahatani, Penggunaan Tenaga Kerja dan Permodalan

Dampak perubahan teknologi (dalam program SUTPA dan NON-SUTPA) terhadap tingkat pendapatan dengan usahatani teknik tabela (tanam benih langsung) menunjukkan superior, baik dari produktivitas, keuntungan maupun efisiensi (R/C ratio) dibanding tapin (tanam pindah) tanpa membedakan varietas dan musim tanam. Namun di Banyuwangi, produksi dengan tabela relatif lebih rendah dibanding dengan teknik tapin yang diduga berkaitan erat dengan masalah sulitnya pengendalian gulma, di samping persentase kerebahan yang lebih besar pada teknik tabela.

Di Lampung Selatan, produksi tertinggi diperoleh dengan teknik tabela manual, sedang dengan teknik tabela-atabela tidak memberi produksi yang berbeda dengan teknik tapin. Produksi tertinggi pada musim kering justru dicapai dengan sistem tapin, walau perbedaan tidak mencolok dibanding dengan sistem tabela. Pengembangan dengan pendekatan "top down" memang diperlukan, tapi harus dibarengi keseimbangan dengan pendekatan "bottom up", dengan waktu relatif lama, tapi kemungkinan teknologi yang diintroduksi dapat melembaga lebih besar (tabel 9).

Tabel 9. Analisa Usahatani Padi Berdasarkan Kelompok Petani dan Musim di Kabupaten Banyuwangi

Uraian	MH 95/96			MK I '96			MK II '96 Non SUTPA
	UPK	Luar UPK	Non Sutpa	UPK ¹⁾	UPK ²⁾	Luar UPK	
A. Biaya							
1. saprodi	281.128	300.788	248.893	243.259	227.751	221.832	303.796
2. Upah TK LK	616.383	523.557	626.685	777.572	456.159	393.619	667.220
3. TK DK	120.988	196.549	57.017	175.897	216.035	287.131	3.778
4. Biaya lain-lain	53.726	116.469	60.480	44.534	55.759	46.546	51.383
Total Biaya	1.072.225	1.137.363	993.075	1.241.262	955.704	949.128	1.026.177
B. Penerimaan	2.908.854	3.038.467	2.560.759	2.757.318	2.408.185	2.398.934	2.088.850
C. Keuntungan	1.836.629	1.901.104	1.567.684	1.516.056	1.452.481	1.449.806	1.062.673

Sumber: Data primer diolah.

Keterangan: ¹⁾ tapin; ²⁾ tabela.

Petani yang memiliki kegiatan off-farm dan non-farm cukup tinggi, juga banyak yang beralih dari tabela kembali ke sistem tapin, karena: teknik tabela memerlukan pemeliharaan tanaman yang lebih intensif, terutama hingga 3 minggu setelah tabela, sedang pada sistem tapin setelah selesai tanam pemeliharaan dapat diserahkan pada anggota keluarga. Salah satu alasan diintroduksikannya teknologi sistem tanam tabela adalah untuk mengurangi kebutuhan tenaga kerja pada usahatani padi dengan mereduksi tenaga kerja pada kegiatan tanam. Aplikasi atabela (tabela dengan alat) hanya membutuhkan 3-4 HOK per Ha, dibandingkan sistem tapin yang membutuhkan tenagakerja persemaian, mencabut benih, serta penanaman. Keseluruhan tenagakerja untuk tapin bisa menghabiskan lebih dari 30 HOK pria dan wanita. Di samping itu, kekurangan tenaga kerja dan tingkat upah yang tinggi menyebabkan areal tabela tidak dapat disiangi dengan baik oleh sebagian petani.

Pengendalian gulma dengan herbisida merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan tabela. Penggunaan herbisida perlu dikaji ulang melalui *super imposed trial* sehingga diketahui jenis, takaran, waktu, dan cara pengaplikasiannya. Komponen teknologi pemupukan perlu disempurnakan, dengan memperhatikan rekomendasi berdasarkan ketersediaan hara tanah, juga harus mempertimbangkan populasi tanaman, karena dengan tabela, populasi tanaman hampir 2x lipat dibanding dengan tapin.

Penggunaan tenaga kerja dengan sistem tabela di UHP Banyuwangi, Bojonegoro, dan Lampung, lebih tinggi dibanding dengan sistem tapin. Di UHP Lampung Selatan sebaliknya yakni penggunaan tenaga kerja sedikit lebih rendah pada sistem tabela. Berkurangnya tenaga kerja untuk kegiatan tanam dan persemaian pada sistem tabela, tetapi membutuhkan tenaga kerja yang jauh lebih banyak untuk pemeliharaan tanaman, yakni: mengatur kembali larikan dan penyiangan gulma yang tumbuh lebat.

Penggunaan tenaga kerja baik pria, wanita; mesin dan ternak, maupun sumbernya (dalam keluarga dan luar keluarga) pada usahatani bervariasi sesuai dengan tahapan dan jenis kegiatan. Secara garis besar dapat dikelompokkan dalam: 1) pengolahan tanah; 2) persemaian; 3) tanam; 4) pemupukan; 5) penyiangan; 6) pengendalian hama penyakit; 7) panen; dan 8) pasca panen. Tenaga kerja wanita umumnya digunakan untuk tanam; penyiangan gulma; dan panen. Tenaga mesin dan traktor merupakan tenaga kerja substitusi yang banyak digunakan pada kegiatan pengolahan tanah sampai persiapan tanam. Penggunaan tenaga kerja upahan luar keluarga, baik pria dan wanita, mayoritas dikarenakan

keterbatasan tenaga kerja dalam keluarga, mempengaruhi biaya usahatani dan penerimaan petani tentunya

Di Bojonegoro, proporsi tenaga kerja luar keluarga lebih besar. Pengolahan tanah dilakukan dengan traktor, walau masih ditemukan penggunaan ternak. Penggunaan traktor karena: relatif cepat dan tersedia, topografi lahan sawah relatif datar, dan adanya jadwal tanam yang ketat, dengan sistem borongan. Penggunaan tenaga kerja manusia dan ternak dilakukan dengan sistem upah harian. Di Lampung Selatan, tinggi rendahnya penggunaan tenaga kerja tergantung kondisi lahan dan jumlah jam kerja per hari. Sedang jumlah jam kerja per hari tergantung pada jenis pekerjaan (antara 3-8 jam). Proporsi terbesar dalam analisis biaya usahatani umumnya berasal dari biaya tenaga kerja. Di Lampung Tengah, proporsi penggunaan tenaga kerja luar keluarga di usahatani padi relatif lebih tinggi. namun pada usahatani palawija adalah sebaliknya, disebabkan perbedaan tahapan pekerjaan dan bobot kerja pada setiap jenis dan tahap kegiatan usahatani terkait. Sistem upah harian biasanya diterapkan pada kegiatan: pembuatan persemaian, pengolahan tanah dengan ternak dan manusia (mencangkul), serta kegiatan pemeliharaan lainnya.

Dalam cara pembayaran upah TK dikenal sistem harian dan borongan, yang tergantung pada jenis kegiatan dan pekerjaannya. Upah borongan banyak dilakukan petani pada kegiatan pengolahan tanah dengan traktor dan kegiatan panen. Selain dari kegiatan tersebut, biasanya diperlakukan sistem upah harian. Penggunaan TK dapat dibedakan menurut musim tanam dan sistem tanam, yang analisisnya dibatasi pada kegiatan pra panen, karena terkait dengan pembayaran upah kerja. Sedang TK panen, pembayarannya diperhitungkan dari hasil panen, yakni berupa bagi hasil (bawon). Sistem upah borongan umumnya diterapkan pada kegiatan pengolahan tanah dengan traktor, dan penanaman (upah per satuan luas lahan), serta panen (bawon). Besar upah bawon (natura) yang umum berlaku adalah 6:1, atau sekitar 14,28% dari total produksi.

Sumber permodalan yang paling banyak adalah perorangan yang merupakan lembaga tradisional (21,3%), program KUT (6,5%), Bos/tauke (4,3%), sedangkan BRI hanya sebesar 3% dan KUD sebesar 2,3%. Terkait dengan KUT Pola Khusus, yang diluncurkan akhir '95, membuka peluang besar bagi pendapatan petani terutama dalam membantu modal untuk pengadaan saprodi, dengan memperhatikan berbagai faktor, seperti: 1) keterlambatan realisasi; 2) ketepatan waktu (penting terkait efektifitas perlakuan dalam usahatani); 3) business interest tidak terlalu ditonjolkan oleh pelaku pengadaan dan penyaluran saprodi tersebut, yang membutuhkan pengaturan baru melalui kebijakan dari pemerintah.

Dalam konteks kelembagaan dan mobilitas tenaga kerja pedesaan, dapat dikemukakan bahwasanya kelembagaan dalam kajian ini menyangkut dinamika hubungan kerja pertanian dan pedesaan secara spasial di beberapa daerah di Indonesia. Mobilitas tenaga kerja mencakup arah dan pola migrasi serta profil dan wilayah, serta dampaknya

terhadap penyerapan dan pendapatan terkait dengan kesejahteraan para tenaga kerja pedesaan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

1. Persepsi para buruh tani terhadap ketenagakerjaan di sektor usahatani berkaitan erat dengan manfaat yang diperoleh (tingkat upah, insentif) di samping mempererat hubungan sosial (berdasarkan silaturahmi) di antara pemilik dan buruh tani, yang memberikan jaminan kerja pada mereka dan keberlanjutan pekerjaan tersebut bagi mereka.
2. Secara bertahap diperlukan perubahan persepsi terhadap pekerjaan di sektor pertanian yang dianggap sebagai kegiatan yang kurang terhormat (kotor karena lumpur sawah, kerja mencangkul yang berat, tidak punya sawah sendiri, butuh waktu lama baru panen, harga produk/panen yang rendah, upah yang kecil, hasil panen yang dijual menghasilkan uang yang dirasa relatif kecil dan kadang harus dikurangi biaya untuk modal produksi di musim tanam berikutnya) dan jenis pekerjaan yang dipilih sebagai alternatif terakhir.
3. Proporsi pendapatan dari masing-masing buruh tani sangat bervariasi antar rumah tangga, yang tergantung pada aksesibilitas terhadap kesempatan-kesempatan ekonomi dan penguasaan sumberdaya produktif setiap angkatan kerja rumah tangga. Terdapat perbedaan (yang kecil) struktur pendapatan antar rumah tangga buruh tani, namun struktur tersebut hanya karena perbedaan spesifikasi antar lokasi/daerah.
4. Pembangunan pertanian ketenagakerjaan perlu diletakkan dalam perspektif pembangunan ketenagakerjaan nasional dan pembangunan pertanian. Dengan demikian perhatian utama sasaran pembangunan pertanian yang terkait dengan ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan kesempatan kerja produktif dan pada kesempatan berusaha.
5. Di samping menghadapi era pasar bebas, beberapa Tantangan Pertanian ke Depan adalah: a) skala usaha pertanian yang relatif kecil, bentuk pasar yang tidak efisien dan kemampuan manajemen petani yang rendah serta kurangnya informasi pertanian; b) pengembangan pertanian dengan orientasi agribisnis masih tersendat-sendat. Banyaknya pengaruh faktor sumberdaya manusia di dalam ketidakberhasilan tersebut, terutama kurangnya kesadaran petani untuk berkelompok dan kurangnya tenaga-tenaga profesional.
6. Kondisi-kondisi yang menunjukkan berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian tersendiri dalam aspek ketenagakerjaan pertanian di Indonesia, seperti: 1) rendahnya produktivitas pengusahaan dan kualitas tanaman pertanaman terutama palawija; 2) kurang bakunya produk pertanian; 3) sulitnya menjaga kontinuitas produksi

pertanian; 4)lemahnya kelembagaan yang mengkaitkan sub sistem produksi dengan pengolahan hasil pertanian; dan 5)kurang tersedianya infrastruktur yang mendukung kegiatan pertanian.

7. Dalam aspek ketenagakerjaan pertanian di Indonesia, terdapat berbagai hambatan seperti: 1)rendahnya produktivitas pengusaha dan kualitas tanaman pertanaman terutama palawija; 2)kurang bakunya produk pertanian; 3)sulitnya menjaga kontinuitas produksi pertanian; 4)lemahnya kelembagaan yang mengkaitkan sub sistem produksi dengan pengolahan hasil pertanian; dan 5)kurang tersedianya infrastruktur yang mendukung kegiatan pertanian.
8. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, perlu diterapkan kebijakan yang difokuskan pada: 1)pengintegrasian manajemen; 2)pengintegrasian pemilihan pengusaha; 3)pengintegrasian pembinaan; 4)pengintegrasian ruang.
9. Pentingnya peningkatan peranan ahli teknik/keterkaitan pertanian untuk menunjang pengembangan pertanian (yang mengarah ke agroindustri) adalah rekayasa infrastruktur pedesaan yang mampu mendorong pembangunan pertanian dan industri-industri, sistem pengairan dan drainase serta pembangunan sarana pendukungnya.
10. Perlunya meningkatkan peran pemerintah dalam mempertahankan lahan-lahan pertanian, antara lain dengan mengurangi dan memperkecil alih fungsi (konversi) lahan dari sektor pertanian menjadi sektor non-pertanian. Hal ini merupakan tindakan yang mustahil seiring dengan perkembangan (yang berkaitan dengan era modernisasi) suatu wilayah yang berhubungan dengan perubahan sosial terutama sektor perekonomian, dimana tanah menjadi komoditi ekonomi yang tinggi nilai jualnya; Namun keadaan ini bisa saja menjadi suatu keniscayaan jika saja pemerintah memiliki suatu kebijakan yang positif dan keberpihakan terhadap kesinambungan dan kelestarian sektor pertanian yang dilaksanakan dengan tingkat konsekuensi dan kesadaran tinggi akan pentingnya peran sektor pertanian, dan dengan tidak pernah mengabaikan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan sumber pendapatannya pada sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
11. Pada dasarnya, pemberdayaan ketenagakerjaan di sektor pertanian memiliki potensi yang sangat besar di daerah ini, dengan mengingat terdapatnya institusi/lembaga pendidikan yang berorientasi pertanian (IPB). Untuk itu perlu diupayakan suatu kelembagaan yang berkaitan dengan keberlangsungan sektor pertanian (salah satunya sebagai tempat praktek lapang para mahasiswanya) untuk menjaga berkelanjutan dan berkesinambungannya salah satu arah dan tujuan pendidikan dari institusi tersebut (yaitu: pertanian).
12. Pemberdayaan kelembagaan tersebut merupakan upaya menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan potensi kelembagaan tersebut, seperti dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Di samping itu,

juga diperlukan upaya untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki dengan membuka/menciptakan aksesibilitas pada berbagai peluang yang menjadikan lembaga semakin berdaya. Lebih lanjut, juga diperlukan perlindungan terhadap lembaga sebagai keberpihakan yang mencegah dan membatasi konversi lahan dan persaingan yang tidak seimbang dan cenderung mengeksploitasi, dari yang bermodal kuat terhadap yang lemah.

13. Faktor-faktor pendukung dan penciptaan iklim yang kondusif bagi pemberdayaan kelembagaan meliputi beberapa aspek. Mengurangi atau bahkan menghilangkan intervensi atas desa terhadap struktur dan norma kelembagaan yang akan disusun dan akan disepakati. Selanjutnya diperlukan sistem dan mekanisme struktur sosial, ekonomi termasuk stabilitas sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup dan tetap memberi perhatian yang besar terhadap kelestarian lingkungan.
14. Ditemukan pergeseran sektoral dari pertanian ke non-pertanian, sesungguhnya tidak menjadi masalah bila saja pergeseran tersebut diiringi oleh kemampuan sektor tersebut untuk menyerap tenaga kerja dari sektor pertanian, dimana nyatanya sektor pertanian masih diharapkan kedominannya dalam menyerap tenaga kerja.

Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan yang dapat ditarik dari pola/arah migrasi, profil, dan dampak mobilitas angkatan kerja dalam berbagai penelitian tersebut, antara lain: 1) pengembangan infrastruktur dan modernisasi pembangunan pertanian dan pedesaan perlu dilakukan secara parallel dengan sasaran peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani serta keseimbangan pembangunan sektoral dan wilayah; 2) pengembangan SDM pedesaan perlu diberikan prioritas untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja profesional sebagai komplemen berbagai jenis pekerjaan, baik buruh industri dan bangunan yang menjadi pilihan dominan saat ini; 3) dampak peningkatan pendapatan dari kegiatan migrasi telah menimbulkan dampak pengganda peningkatan konservasi, sehingga diperlukan pengembangan kegiatan jasa (distribusi, perdagangan, dan industri pengolahan pangan) yang sedapat mungkin dilakukan dapat dilakukan dan dinikmati oleh masyarakat pedesaan sendiri; dan 4) pelaksanaan suatu kebijakan, misalnya otonomi daerah, akan meningkatkan pilihan tujuan migrasi, dan strategi pembangunan hendaknya difokuskan di wilayah pedesaan dengan basis industri non-pertanian untuk Jawa dan berbasis pertanian untuk di luar Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Rachmat, M., dkk. 2000. Dinamika Kelembagaan Lahan dan Hubungan Kerja Pertanian; dalam: Prosiding PSE (2000). PSE. Bogor.
- Saptana, dkk. 2000. Dampak Industrialisasi Terhadap Pola Penguasaan lahan, Pola Hubungan Kerja, Kesempatan Kerja dan Pendapatan; dalam: Prosiding. PSE. (2000). PSE. Bogor.
- Saptana, dkk.2000. Pola Hubungan Kerja dan Sistem Upah Sektor Pertanian di Pedesaan Jawa Timur; dalam: Prosiding PSE (2000). PSE. Bogor.
- Sudana, dkk. 2000. Profil dan Mobilitas Tenagakerja Pedesaan di Pedesaan PATANAS Jawa dan Luar Jawa; dalam: Prosiding PSE. (2000). PSE. Bogor.
- Suryani, E. dan S.H. Susilowati (2000). Pola Hubungan Kerja Pertanian di Pedesaan Kalimantan Selatan; dalam: Prosiding PSE (2000). PSE. Bogor.
- Syafaat, N., dkk. (2000). Dampak Mobilitas Angkatan Kerja terhadap Penyerapan Tenagakerja dan Pendapatan Rumah tangga Pedesaan; dalam: Prosiding PSE (2000). PSE. Bogor.
- Tim PATANAS (1996-2006). Berbagai hasil Penelitian Struktur Kesempatan Kerja dan Pendapatan di Pedesaan pada Survei Panel Petani Nasional (PATANAS) di berbagai daerah. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (d/h PSE). Bogor.